

BAB II

DINAMIKA PERDAGANGAN ILEGAL HARIMAU DI *GREATER MEKONG* DAN KETERLIBATAN *WILDLIFE JUSTICE COMMISSION*

Menelusuri dinamika perdagangan ilegal harimau di kawasan *Greater Mekong* serta bagaimana terlibatnya *Wildlife Justice Commission* (WJC) dalam merespons persoalan tersebut, akan membantu untuk mengidentifikasi seperti apa kondisi yang membuka ruang bagi keterlibatan aktor non-negara dalam berkontribusi dan menunjukkan upaya penanganannya. Pemaparan ini menjadi landasan penting untuk memahami konteks kemunculan dan keterlibatan *Wildlife Justice Commission*, termasuk melalui investigasi intelijen yang dilakukan dalam skema *Operation Ambush*, yang akan dijelaskan sebagai bagian dari upaya dalam mengungkap jaringan perdagangan ilegal harimau di kawasan tersebut.

2.1. Kompleksitas Perdagangan Ilegal Harimau dan Kerentanan Kawasan *Greater Mekong*

Perdagangan ilegal satwa liar atau *Illegal Wildlife Trade* (IWT) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang disebut-sebut menempati peringkat sebagai salah satu kejahatan paling menguntungkan di dunia, dengan estimasi keuntungan setiap tahunnya menyentuh kisaran angka 20 Milliar USD (Interpol, n.d.). Dengan nominal yang fantastis tersebut akhirnya menciptakan insentif yang kuat dalam

memberikan dorongan eksploitasi terhadap berbagai spesies yang bernilai tinggi, salah satunya seperti harimau (*panthera tigris*).

Dalam praktiknya, perdagangan ilegal satwa liar secara umum tidak selalu menargetkan satu spesies saja, melainkan diwarnai dengan berbagai spesies yang nilai jualnya terbilang tinggi di pasar internasional, seperti gajah untuk gadingnya, badak untuk cularnya, trenggiling untuk sisik maupun dagingnya, dan masih banyak lagi (Interpol, 2022). Di antara ragamnya spesies fauna tersebut, harimau menjadi salah satu yang memiliki permintaan pasar yang cukup kompleks, mengingat permintaan yang ada untuk harimau tidak terbatas pada satu bagian tubuh saja, karena hampir seluruh bagian tubuhnya memiliki nilai ekonomi dan kegunaan tersendiri di pasar (Wong & Krishnasamy, 2022).

Permintaan pasar internasional akan harimau dipicu oleh sejumlah faktor sosial dan budaya. Dalam rangka pengobatan tradisional seperti *Traditional Chinese Medicine* (TCM), satwa ini dimanfaatkan sebagai salah satu bahan baku pembuatannya karena dipercaya dapat menyembuhkan penyakit, padahal di satu sisi khasiat obat ekstraksi harimau ini sebenarnya tidak terbukti benar secara ilmiah. Selain itu adanya minat dalam mengoleksi bagian-bagian tubuh harimau seperti tulang, kulit, cakar dan gigi untuk dijadikan dekorasi juga kerap diasosiasikan dengan simbol status seseorang, karena kelangkaan serta nilainya yang tinggi (*World Wildlife Fund, 2020*). Kepercayaan akan nilai budaya dan sosial semacam inilah yang berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan permintaan pasar.

Tingginya permintaan pasar akan harimau sebenarnya telah lama menarik atensi serius dari komunitas internasional, yang mana terlihat selaras dengan keberadaan kerangka hukum internasional seperti *Convention on International Trade of Endangered Species* (CITES) (CITES, 2022b). CITES merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa segala bentuk perdagangan atas spesies fauna maupun flora tidak mengancam kelangsungan hidupnya (CITES, n.d.). Dalam CITES spesies harimau sendiri diklasifikasikan ke dalam *Appendix I*, kategori ini memperjelas bahwa bagi spesies yang terancam punah, diberlakukan larangan perdagangan internasional atas bagian tubuhnya maupun segala bentuk produk turunannya untuk tujuan komersial (CITES, 2022b). Selain itu menurut *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), spesies harimau (*panthera tigris*) berada dalam daftar merah mereka dengan status *endangered* atau terancam punah (IUCN, n.d.). Meskipun demikian, realitanya keberadaan kerangka hukum internasional yang ada tidak serta merta menghilangkan permintaan pasar terhadap harimau.

Dalam dinamika perdagangan ilegal harimau di *Greater Mekong* sendiri, spesies ini melibatkan sebaran subspecies yang beragam baik dari dalam maupun luar kawasan. Harimau Indocina merupakan salah satu subspecies yang tersebar dominan di kawasan ini utamanya di Vietnam, Laos, dan Thailand (WWF, 2010b). Selain itu dari luar kawasan subspecies lain yang turut menjadi korban termasuk Harimau Malaya yang bersumber dari hutan Malaysia, Harimau Sumatra dari Indonesia, serta Harimau Benggala yang habitat aslinya di India ini menunjukkan bahwa beragam subspecies

harimau ikut berada di tengah-tengah aliran pasokan jaringan perdagangan ilegal yang menunjukkan sifat transnasional yang kuat, bahkan subspecies non asli seperti Harimau Siberia juga ikut diperdagangkan dan kerap berasal dari hasil penangkaran (WJC, 2016c, 2022).

Mirisnya dalam praktik penangkaran ini juga sering kali memungkinkan terjadinya proses hibrida hewan seperti *liger* atau *lion tiger*, hibrida ini terjadi akibat hasil perkawinan silang harimau dengan singa di penangkaran, yang sebenarnya secara alami hal ini tidak seharusnya terjadi karena habitat singa dan harimau berbeda (WJC, 2022). Hal ini juga turut menjadi kekhawatiran serius mengingat perlindungan spesies yang tidak alami ini menjadi celah yang dimanfaatkan para pelanggar untuk memperdagangkannya apalagi kerap kali belum diatur dalam kerangka hukum yang jelas dalam rangka perlindungannya, semakin menambah kompleksitas dinamika isu ini (WJC, 2022). Menelusuri lebih dalam, pada kenyataannya perdagangan harimau tidak begitu membedakan harimau berdasarkan spesiesnya, bagian tubuh harimau dari berbagai subspecies tersebut umumnya diperdagangkan tanpa pembedaan yang jelas, selama memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar gelap (TRAFFIC, 2022).

Melihat nilai ekonomi yang tinggi juga permintaan yang terus berjalan ini akhirnya menciptakan jaringan perdagangan lintas batas yang kompleks. Aktivitas ini tidak hanya melibatkan negara konsumen, namun juga kawasan-kawasan yang menjadi habitat alami atau konservasi harimau, apalagi jika memiliki jalur distribusi yang strategis. Berbicara lebih lanjut mengenai hal tersebut, *Greater Mekong* menjadi sub

kawasan yang memiliki relevansi kuat dengan dinamika perdagangan ilegal harimau. *Greater Mekong* merupakan suatu sub kawasan yang mencakup Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Thailand serta Tiongkok khususnya Provinsi Yunan dan Ghuangxi, di mana kawasan ini dikenal sebagai salah satu *hostpot* keanekaragaman hayati di dunia. Kawasan ini memiliki lebih dari 20.000 spesies tumbuhan, 1.200 spesies burung, 800 spesies reptil dan amfibi, serta 430 spesies mamalia. Menurut *World Wildlife Fund*, sejak tahun 1997, lebih dari 3.300 spesies baru telah dikatalogkan (World Wildlife Fund, n.d.).

Keragaman spesies di wilayah ini juga menjadi rumah serta konservasi bagi berbagai spesies yang terancam punah, seperti harimau yang kini populasinya hanya tersisa sedikit setelah selama ini mengalami penurunan drastis dalam beberapa dekade terakhir. Populasi harimau dari sekitar 100.000 ekor pada awal abad ke-20 turun ke angka 3.200 ekor pada tahun 2010 (Share America, 2014). Meskipun sejak evaluasi terakhir di tahun 2016 sempat terjadi peningkatan populasi sekitar 40% atau sebanyak 3.890 ekor harimau, yang tersebar di seluruh dunia berkat adanya perbaikan dalam pemantauan populasi, secara keseluruhan jumlahnya tetap menunjukkan penurunan signifikan dibanding awal abad ke-20 (World Wildlife Fund, 2016).

Ironisnya rendahnya angka populasi satwa ini tidak hanya dipengaruhi oleh perburuan liar saja, namun juga terkait erat dengan menjamurnya fasilitas penangkaran atau yang kerap disebut sebagai "*Tiger Farms*". Alih-alih berfungsi sebagai sarana konservasi, fasilitas semacam ini justru kerap disalahgunakan sebagai kedok untuk

memfasilitasi perdagangan harimau secara ilegal ke pasar gelap, di mana harimau sengaja dikembangbiakkan dalam penangkaran agar dapat menjadi pasokan dalam memenuhi permintaan pasar (World Wildlife Fund, 2020). Dalam berbagai laporan disebutkan bahwa pasokan harimau ataupun bagian tubuhnya yang berasal dari kawasan ini mengalir ke pasar yang dominan, datang dari Tiongkok dan Vietnam sebagai negara konsumen (WJC, 2022).

Di *Greater Mekong*, Laos, Thailand, dan Vietnam merupakan negara-negara yang menjadi titik konsentrasi terbesar *tiger farms*. Di mana Laos menampung sekitar 450 fasilitas, Thailand 1.600, dan Vietnam 395 (World Wildlife Fund, 2020). Selain itu selama ini praktik korupsi dan pemalsuan dokumen (*fraud*) telah lama menjadi unsur yang melanggengkan perdagangan ilegal semacam ini. Dalam melancarkan aksinya pengelola *tiger farms* atau *traffickers* diketahui memiliki hubungan dengan oknum aparat ataupun pihak lain yang memiliki akses terhadap prosedur pemeriksaan di perbatasan, bandara, atau di lembaga inspeksi tertentu, sehingga ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dan manipulasi birokrasi menjadi faktor yang turut memungkinkan fasilitas penangkaran tersebut tetap beroperasi dan memasok perdagangan ilegal harimau di kawasan *Greater Mekong* (WJC, 2022). Pusat konsentrasi yang tidak kecil di satu sub kawasan serta pengawasan dan penegakan hukum yang lemah membuat pelaku tidak mudah terdeteksi dan ikut menunjukkan

bahwa *Greater Mekong* telah berkembang menjadi pusat penangkaran dengan skala yang berpengaruh.

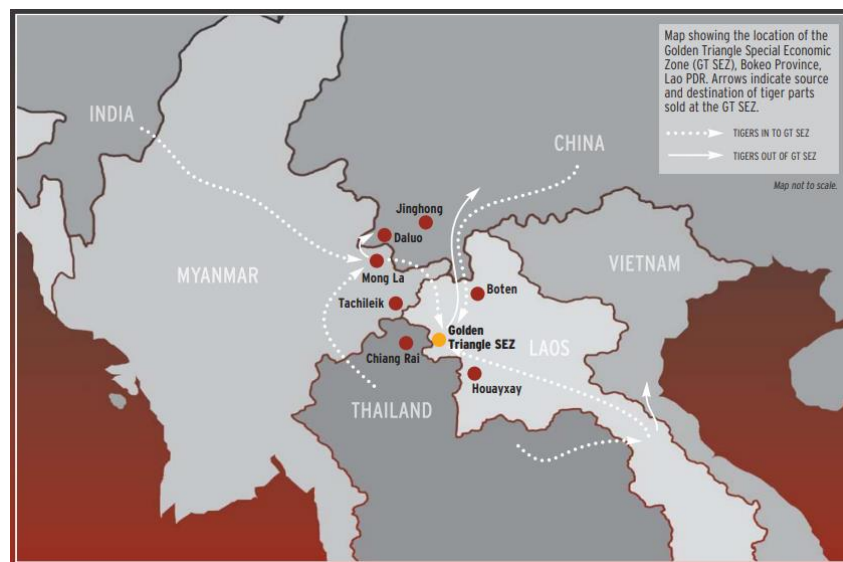


Gambar 2. 1. Peta Kawasan *Greater Mekong*

Sumber : Energy Policy (Yang. et al, 2022)

Bila melihat simbol garis berwarna biru pada Gambar 2.1. ini menunjukkan aliran Sungai Mekong sebagai sungai terpanjang ke-7 di Asia dan ke-12 di dunia (Indrayani et al., 2021). Ilustrasi ini juga semakin mempertegas bagaimana kemungkinan distribusi lintas batas terjadi, dan tidak dapat dipisahkan dari karakter geografis *Greater Mekong* yang sangat terhubung. Selain karena adanya peran Sungai Mekong yang terbentang sejauh 4.350 km dalam menghubungkan lima negara Asia Tenggara dengan

sebagian Selatan Tiongkok di kawasan ini (Luong, 2020). Keenam negara *Greater Mekong* juga berbagi garis perbatasan darat yang panjang sekitar 12.000 km, membuatnya memiliki perbatasan yang berpori (*porous borders*). Ditambah lagi berbagai pembangunan infrastruktur yang berada di bawah inisiatif ekonomi regional semakin mempermudah segala bentuk mobilisasi, tetapi di sisi lain juga memberikan konsekuensi terbukanya ruang mobilitas yang sulit diawasi secara menyeluruh. (GIATOC, 2023).



Gambar 2. 2. Rute Distribusi *Tiger Parts* dari GTSEZ

Sumber : EIA, 2015

Kompleksitas perdagangan ilegal harimau di kawasan ini semakin diperkuat dengan keberadaan zona ekonomi khusus seperti *Golden Triangle Special Economic Zone* (GTSEZ) yang terletak di Provinsi Bokeo, Laos dan berbatasan dengan Thailand serta Myanmar (*International Crisis Group, 2024*). Dari gambar 2.2. dapat terlihat

bagaimana distribusi keluar dan masuknya *tiger parts* atau bagian-bagian tubuh harimau dari negara satu ke negara yang lain, menandai jaringan perdagangan lintas batas yang menjanjikan (EIA, 2015b). Inisiasi GTSEZ ini sebenarnya berangkat dari visi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di mana pemerintah Laos melakukan perjanjian konsesi dengan memberikan hak kelola selama 99 tahun kepada *King Romans Group* agar dapat menarik investasi asing, serta mengembangkannya menjadi industri pariwisata, perdagangan dan hiburan (International Crisis Group, 2024). Dalam perkembangannya zona ini didominasi oleh kasino, hotel, dan bisnis lintas negara yang menarik berbagai pendatang dan investor terutama dari Tiongkok. Meskipun awalnya dikembangkan sebagai strategi pembangunan ekonomi, sejumlah informasi internasional menerangkan bahwa titik ini juga berevolusi menjadi ruang operasional bagi berbagai aktivitas kriminal lintas negara (International Crisis Group, 2024).

International crisis group mendeskripsikan wilayah di sepanjang aliran Sungai Mekong ini sebagai zona kriminal yang terus bergerak dan sulit dijangkau oleh otoritas negara, yang membuat banyak aktivitas seperti kasino, *money laundering*, perdagangan narkoba, *human trafficking*, hingga perdagangan ilegal satwa liar terus berlangsung bersamaan (International Crisis Group, 2024). *United Nations Office on Drugs and Crimes* mengungkapkan bahwa beberapa zona ekonomi khusus di kawasan *Greater Mekong* seringkali menawarkan regulasi yang lebih longgar agar dapat lebih menarik investasi (UNODC, 2016). Ruang ekonomi yang relatif longgar ini, ditambah dengan

lemahnya koordinasi lintas otoritas, memunculkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan ilegal untuk menyamarkan aktivitasnya di balik kegiatan bisnis formal.

Keterkaitan zona ini dalam perdagangan ilegal harimau secara spesifik terletak pada sifatnya di sini yang cenderung menjadi “*safe haven*” bagi banyaknya aktivitas kriminal transnasional. Klaim ini semakin diperkuat setelah Departemen Keuangan Amerika Serikat yang menetapkan pendiri zona tersebut yaitu Zhao Wei, sebagai pemimpin *Transnational Criminal Organizations* (TCO) di tahun 2018 atas keterlibatannya dalam perdagangan narkoba, satwa liar dan *money laundering* (EIA, 2015b, 2018; U.S. Department of the Treasury, 2018). Di dalam GTSEZ, bagian-bagian tubuh harimau diperdagangkan di kios-kios secara terbuka, selain dalam bentuk elemen dekorasi, *tiger bone wine* atau anggur tulang harimau juga menjadi produk lain yang di perjualbelikan di zona ekonomi khusus ini (EIA, 2015b). Investigasi WJC dan EIA juga mengonfirmasi keberadaan *tiger farms* serta rumah jagal di dalam zona ini, yang berfungsi sebagai infrastruktur logistik untuk mencuci satwa liar hasil perburuan maupun penangkaran ke dalam pasar gelap internasional tanpa tersentuh oleh hukum (EIA, 2015b; WJC, 2022). Dalam menyikapi hal ini, posisi zona ekonomi khusus di sini tidak serta merta langsung dianggap sebagai penyebab perdagangan ilegal, tetapi menunjukkan bahwa zona ekonomi khusus seperti GTSEZ dapat dimanfaatkan sebagai ruang yang memperbesar peluang terjadinya praktik tersebut ketika terdapat celah dalam pengawasan dan penegakan aturan yang berlaku.

Dinamika perdagangan ilegal harimau di kawasan *Greater Mekong* menunjukkan adanya interaksi berbagai faktor struktural yang saling memperkuat dan menantang pengambilan langkah penanganan yang lebih strategis, yang tidak bisa terbatas pada tindakan reaktif saja. Kombinasi kondisi geografis dengan perbatasan yang berpori (*porous borders*) membuat transformasi koridor ekonomi menjadi jalan tol bagi perdagangan ilegal, telah menciptakan lingkungan yang ideal bagi sindikat kriminal untuk beroperasi (GIATOC, 2023). Melihat masifnya fasilitas penangkaran harimau (*tiger farms*) yang berfungsi sebagai kedok pencucian satwa semakin mempertegas bahwa tantangan utama di kawasan ini bukan lagi sekadar isu perburuan liar di lapangan, melainkan infiltrasi kejahatan terorganisir yang memanfaatkan kelemahan kapasitas institusional dan yurisdiksi negara.

Oleh karena itu, memahami kompleksitas geografis dan sistemik di kawasan *Greater Mekong* menjadi penting, mengingat karakteristik kawasan ini menciptakan kondisi struktural yang memungkinkan jaringan kejahatan transnasional beroperasi dengan leluasa. Situasi tersebut kemudian mendorong negara-negara di kawasan untuk merespons melalui berbagai mekanisme kerja sama regional maupun kebijakan domestik dalam upaya memperkuat penegakan dinamikahukum terhadap perdagangan satwa liar ilegal.

2.2. Upaya Negara-Negara *Greater Mekong* dalam Merespons Perdagangan Ilegal Harimau di *Greater Mekong Region*

Menyadari problematika yang rumit terkait perdagangan ilegal harimau di kawasan ini, negara-negara Asia Tenggara melalui *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) telah lama menyusun sebuah mekanisme kerja sama lintas negara mengenai kejahatan satwa liar di kawasan Asia Tenggara yaitu *ASEAN Wildlife Enforcement Network* (ASEAN WEN). Jaringan kerja sama yang dibentuk pada 1 Desember 2005 ini, bertujuan untuk meningkatkan komitmen terhadap CITES, memperkuat koordinasi lintas negara, pertukaran informasi, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (ASEAN, 2014).

ASEAN-WEN mewakili inisiatif antar-pemerintah dan lintas-lembaga terbesar di dunia yang didedikasikan untuk melawan perdagangan ilegal flora dan fauna yang terancam punah (CITES, 2022a). Jaringan ini mengintegrasikan otoritas CITES, bea cukai, kepolisian, jaksa, dan lembaga penegak hukum khusus dari 10 negara anggota ASEAN untuk bekerja secara proaktif dalam merespons tingkat perdagangan satwa liar yang mengkhawatirkan di kawasan tersebut (CITES, 2022a). Secara operasional, ASEAN-WEN berfungsi sebagai fasilitator pertukaran praktik terbaik dan informasi intelijen lintas batas. Fokus utamanya adalah membongkar jaringan perdagangan besar yang beroperasi secara transnasional. Jaringan ini didukung oleh mitra internasional seperti USAID, FREELAND Foundation, dan TRAFFIC, serta menjalin hubungan erat dengan Sekretariat ASEAN di Jakarta (TRAFFIC, 2011). Bagi negara-negara di

Greater Mekong, ASEAN-WEN memberikan kerangka kerja untuk menstandarisasi protokol pemantauan penegakan hukum dan meningkatkan kapasitas taksonomi serta identifikasi spesies bagi petugas lapangan (TRAFFIC, 2011).

Di tingkat domestik, negara seperti Thailand juga telah mengambil langkah strategis. Sebelum lahirnya ASEAN WEN, pada 2004 Thailand lebih dulu menginisiasi kerangka kerjasama nasional mereka yaitu *Thailand Wildlife Enforcement Network* (Thailand-WEN) yang dibentuk oleh *Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation (DNP)*, Departemen Bea Cukai Thailand, dan Polisi Nasional Kerajaan Thailand. Pembentukan Thailand WEN ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum terkait perdagangan satwa liar ilegal (Illegal Wildlife Trade Projects, 2021). Selain itu, pada 2019 pemerintah Thailand memutuskan untuk memperbarui undang-undang nasional mereka yang membahas mengenai konservasi dan perlindungan satwa liar yaitu *Wildlife Conservation and Protection Act* (WARPA) guna memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap satwa liar (Illegal Wildlife Trade Projects, 2021).

Di luar kerangka regional, intensitas perdagangan ilegal harimau di wilayah Laos, Thailand, dan Vietnam sebagai titik krusial keberadaan *tiger farms* telah mendorong ketiga negara tersebut untuk memperkuat penanganan melalui kolaborasi bilateral. Kolaborasi ini mencakup berbagai inisiatif strategis, seperti pertemuan teknis, pelatihan bersama, serta pembentukan mekanisme komunikasi lintas batas untuk meningkatkan koordinasi dan kapasitas penegakan hukum. Implementasi nyata

komitmen ini terlihat dari pertemuan teknis antara Vietnam dan Laos di Da Nang, Vietnam pada Juli 2019 (Tran, 2019). Forum yang dihadiri 40 perwakilan lintas institusi ini menjadi momentum yang krusial, di mana kedua negara sama-sama menekankan pentingnya membangun mekanisme komunikasi yang responsif dan ketepatan waktu dalam berbagi informasi antar aparat penegak hukum. Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, akhirnya disepakati rencana kerja sama bilateral untuk periode 2019–2020, yang mencakup pelaksanaan investigasi bersama serta pelatihan peningkatan kapasitas bagi petugas lapangan (Tran, 2019).

Komitmen serupa juga ditunjukkan oleh Thailand dan Laos melalui serangkaian pertemuan di Huay Xai, Laos pada Agustus 2022 serta di Chiang Khong, Provinsi Chiang Rai, Thailand pada September 2022 (Laotian Times, 2022). Upaya ini difokuskan dalam membangun kepercayaan antar lembaga serta memperkuat koordinasi patroli di sepanjang Sungai Mekong. Melalui pertukaran informasi yang lebih intensif, beberapa kasus akhirnya berhasil diungkap, termasuk penyitaan muntjak, beruang madu, serta lebih dari 250 ekor tupai terbang (Laotian Times, 2022). Jejak kolaborasi lain juga terlihat sejak April 2016, ketika Laos terlibat dalam misi lapangan bersama otoritas penegak hukum dari Tiongkok dan Vietnam (WCS, 2016). Peninjauan ke pasar obat tradisional di Guangzhou dan titik-titik penyelundupan utama di perbatasan internasional, menghasilkan penyusunan peta jalan, pembentukan protokol komunikasi langsung hingga pengarusutamaan isu perdagangan satwa liar dalam forum-forum bilateral lintas provinsi (WCS, 2016).

Meskipun berbagai kerangka kerja sama regional, domestik, dan bilateral telah dibentuk untuk memperkuat penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar di kawasan *Greater Mekong*, praktik perdagangan ilegal harimau pada kenyataannya masih terus berlangsung. Yang mana secara signifikan keberadaan *tiger farms* menjadi wujud keterbatasan dan celah dari regulasi yang ada. Mengingat hal ini ikut menjadi bagian dari *transnational organized crime*, di mana berbagai kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum menjadi hal yang mudah dimanfaatkan. Praktik perdagangan ilegal harimau ini yang berkaitan erat dengan korupsi, manipulasi dokumen, serta keterlibatan aktor yang memiliki akses terhadap institusi penegakan hukum, menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan maupun penegakan aturan di lapangan..

Dalam situasi semacam ini, upaya negara saja sering kali tidak cukup untuk mengungkap dan menindak jaringan perdagangan satwa liar yang semakin kompleks. Oleh karena itu, keterlibatan aktor non-negara seperti *International Non-Governmental Organizations* (INGO) mulai memainkan peran yang semakin signifikan dalam mendukung investigasi, menyediakan informasi intelijen mengenai jaringan perdagangan ilegal, serta mendorong akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar lintas negara.

2.3. Kemunculan INGO di bidang Lingkungan dalam Merespons Isu Perdagangan Ilegal Harimau di *Greater Mekong Region*

Perhatian terhadap isu ini yang rupanya tidak hanya datang dari aktor negara, tetapi turut melibatkan aktor non negara khususnya *International Non Governmental Organizations* (INGO) di bidang lingkungan yang hadir dalam berbagai bentuk keterlibatan. *World Wildlife Fund* atau yang sudah banyak orang kenali secara singkat dengan sebutan WWF ini merupakan salah satu INGO di bidang lingkungan yang juga merespons isu perdagangan ilegal harimau di *Greater Mekong* (WWF, n.d.-a). WWF berusaha untuk mengisi celah koordinasi di level regional yang tercermin dengan usahanya dalam memobilisasi kemauan politik negara-negara yang ditujukan untuk mendukung *Global Tiger Recovery Program* (GTRP) yang bertujuan menyelamatkan harimau dari kepunahan (World Bank, 2015; WWF, 2023).

Kemauan global ini dipicu dengan rendahnya populasi harimau pada tahun 2010, yang kala itu hanya tersisa 3.200 ekor di dunia, termasuk 350 ekor di *Greater Mekong* (WWF, n.d.-d). Situasi ini memanggil 13 negara habitat harimau seperti Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Cina, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Rusia, Thailand, dan Vietnam untuk hadir dalam forum *St. Petersburgs Tiger Summit* yang dilaksanakan di Rusia (WWF, n.d.-d). Pada pertemuan itulah kemudian WWF memelopori usulan target ambisius TX2 atau *Two Times Tigers* yang dimaksudkan untuk dapat melipat gandakan jumlah populasi satwa tersebut di tahun 2022 bertepatan dengan “*Year of The Tiger*” (WWF, n.d.-b). Inisiatif ini secara resmi

diluncurkan, juga diadopsi oleh 13 negara termasuk negara-negara di kawasan *Greater Mekong* (WWF, n.d.-d). WWF berkontribusi dalam menempatkan isu ini sebagai agenda diplomasi internasional. Ini menunjukkan bagaimana WWF memiliki fokus arah gerak dan karakteristik di ranah diplomasi dalam rangka meningkatkan kesadaran akan isu ini dan usaha konservasi.

Dalam keberjalanan inisiatif ini, di *Greater Mekong* WWF melihat untuk berfokus pada 3 aspek yaitu *Restore* (memulihkan populasi di habitat asal), *Recover* (meningkatkan jumlah di mana spesies masih ada), dan *Reconnect* (menghubungkan kembali koridor hutan untuk pergerakan harimau dan mangsanya) (WWF, 2010a). Dengan ini strategi yang dilakukan WWF berkisar pada proteksi atas lanskap kawasan konservasi harimau atau yang disebut dengan *Tigers Conservation Landscape* (TCL) (WWF, 2010a). Dalam hal ini WWF memetakan area-area krusial yang menjadi zona aman bagi harimau untuk bereproduksi tanpa gangguan, kemudian menghubungkan area-area tersebut melalui koridor habitat agar harimau dapat bermobilisasi, mencari pasangan, dan menjaga keragaman genetik tanpa terjebak dalam ruang geografis yang terlimitasi (WWF, 2010a). Di dalam bentang alam ini, WWF juga mengintegrasikan perlindungan satwa mangsa seperti babi hutan dan rusa, juga penguatan patroli hutan untuk memastikan bahwa ruang gerak yang luas tersebut benar-benar menyediakan sumber pangan yang cukup dan bebas dari ancaman jerat pemburu (WWF, 2010a).

Meskipun secara global, inisiatif ini berhasil meningkatkan populasi harimau liar dari sekitar 3.200 pada 2010 menjadi estimasi 5.574 pada 2023 (WWF, n.d.-c).

Sayangnya selama keberjalanan TX2, di *Greater Mekong* terutama Kamboja, Laos, dan Vietnam justru terjadi kepunahan fungsional atas harimau yang berarti bahwa berarti populasi harimau sudah sangat sedikit, membuatnya tidak dapat berkembang biak atau bahkan tidak lagi direkognisi sebagai spesies yang memiliki peran yang signifikan dalam ekosistem (WWF, 2021). Secara dominan hal ini terjadi akibat banyaknya perangkap oleh pemburu, kemudian hilangnya habitat, penebangan ilegal, perluasan pertanian hingga perdagangan ilegal atas harimau berikut bagian-bagian tubuhnya (WWF, 2021).

Di sisi lain ketika perdagangan ilegal menjadi ancaman paling imanen, aktor seperti TRAFFIC muncul dengan pengalaman riset pasar selama lebih dari 30 tahun (Piyaporn, 2023). TRAFFIC menyediakan basis data empiris mengenai penyitaan harimau yang membantu negara mengidentifikasi hub-hub utama seperti *Golden Triangle Economic Zone* (GTSEZ) dalam rantai perdagangan ilegal harimau di Greater Mekong (Piyaporn, 2023). TRAFFIC sendiri memang bergerak dalam memberikan sajian laporan riset yang berkaitan erat dengan dimensi ekonomi khususnya perdagangan terhadap satwa liar yang membantu memetakan pola dari kejahatan transnasional yang bersifat kompleks semacam ini (TRAFFIC, n.d.).

Salah satu laporan yang TRAFFIC susun bertajuk "*Skin and Bones*" menjadi bagian dari kontribusi yang diberikan dalam merespons isu perdagangan ilegal harimau di *Greater Mekong* (Wong & Krishnasamy, 2022). Laporan ini berisikan hasil riset dalam rentang tahun 2000-2022 mengenai analisis tren penyitaan spesies harimau yang

turut menyebutkan perdagangan ilegal tetap stabil dengan rata-rata 150 harimau disita setiap tahunnya (Wong & Krishnasamy, 2022). Poin krusial dalam temuan ini adalah identifikasi perubahan sumber pasokan di kawasan *Greater Mekong*, di mana mayoritas harimau yang disita tidak lagi berasal dari populasi di alam liar, melainkan diduga kuat berasal dari fasilitas penangkaran (*tiger farms*). Data menunjukkan bahwa di Thailand dan Vietnam, persentase harimau sitaan yang berasal dari penangkaran mencapai masing-masing 81% dan 67% (Wong & Krishnasamy, 2022). Intinya, laporan ini menegaskan bahwa keberadaan peternakan harimau di kawasan *Greater Mekong* tidak berfungsi sebagai sarana konservasi, melainkan justru menjadi celah bagi pencucian satwa (*laundering*) yang memasok pasar gelap internasional, sehingga menuntut adanya reformasi kebijakan yang lebih ketat terhadap operasionalisasi fasilitas penangkaran tersebut.

Kemunculan INGO lain seperti *Wildlife Conservation Society* (WCS) memberikan dimensi respons di ranah manajemen tapak yang berarti upaya yang dilakukan akan berfokus sepenuhnya pada pengamanan lokasi fisik atau habitat spesifik di mana satwa tersebut berada (WCS Thailand, n.d.-a). WCS membuka cabangnya di beberapa negara, salah satunya Thailand. WCS Thailand menjadi bagian dari WCS pusat yang secara langsung memiliki rekam jejak dalam merespon perdagangan ilegal harimau di *Greater Mekong*. Mengingat kecenderungannya pada manajemen di tingkat tapak dan konservasi, maka dari itu mereka melakukan sejumlah upaya dalam melindungi area konservasi seperti *West Forest Complex* (WEFCOM)

(WCS Thailand, n.d.-d). WEFCON dianggap sebagai jalur hutan terbesar yang tersisa di daratan Asia Tenggara dengan luas 18.000 km², yang terdiri dari 17 kawasan lindung yang berdekatan meliputi 11 taman nasional dan 6 suaka margasatwa (WCS Thailand, n.d.-d).

Melalui kolaborasi intensif dengan *Departments of National Parks* (DNP) Thailand yang dibarengi dengan implementasi sistem SMART (*Spatial Monitoring and Reporting Tool*) yang dipelopori di Suaka Margasatwa Huai Kha Khaeng sejak 2006, pergerakan di WEFCON ini menunjukkan korelasi langsung antara penguatan perlindungan dan pemulihan ekosistem, di mana populasi harimau liar tercatat meningkat sebesar 250% dari sekitar 40 ekor pada 2007 menjadi lebih dari 140 ekor pada 2023 (Global Conservation, n.d.; WCS Thailand, n.d.-b). Keberhasilan ini juga didukung dengan pemulihan populasi mangsa utama seperti rusa sambar dan banteng yang jumlahnya meningkat dua kali lipat, yang menunjukkan kontribusi penting sistem patroli di kawasan tersebut. (WCS, n.d.).

Dinamika upaya yang dijalankan WCS Thailand di WEFCON juga melibatkan perbantuan dalam melacak sindikat perburuan transnasional yang terorganisir, di mana pada tahun 2011 menjadi titik balik penting terutama penegakan hukum menanggapi isu kejahatan terhadap satwa liar ketika koordinasi intelijen antara patroli SMART dan kepolisian berhasil membongkar kasus pemburu harimau lintas batas asal Vietnam di jantung WEFCON melalui bukti digital berupa foto-foto dalam ponsel tersangka (WCS, 2012). Dengan adanya analisis forensik terhadap pola garis harimau yang

uniknya dapat berfungsi layaknya sidik jari, membuat WCS mampu memverifikasi bahwa harimau tersebut diburu di dalam yurisdiksi Thailand, sehingga menghasilkan vonis penjara terberat bagi pelaku kejahatan terhadap satwa liar pada masa tersebut (WCS, 2012). Guna menjamin keberlanjutannya, WCS Thailand juga menutup celah kapasitas jangka panjang melalui program kemitraan akademik dengan Universitas Kasetsart, yang sejak 2006 telah melatih lebih dari 244 ahli biologi dan calon petugas kehutanan dalam manajemen basis data penegakan hukum (WCS Thailand, n.d.-c).

Keterlibatan lain yang juga datang dari *Environmental Investigation Agency* (EIA) dalam ekosistem INGO di *Greater Mekong* mencerminkan perkembangan ragam strategi dalam merespons isu. EIA mulai secara masif memetakan fasilitas penangkaran (*tiger farms*) di Laos, Vietnam, dan Thailand sejak awal 2000-an dengan memanfaatkan metode investigasi penyamaran (*undercover investigation*) (EIA, 2020). Dari temuannya tersebut EIA menyatakan bahwa keberadaan lebih dari 8.000 harimau di 306 fasilitas *tiger farms* yang berada di Thailand, Laos, Vietnam, dan Tiongkok justru menstimulasi permintaan pasar dan menjadi kedok bagi pencucian harimau liar ke pasar gelap, bukan memberikan manfaat bagi kelestarian spesies (EIA, 2020). Selain itu, EIA juga menyebutkan bahwa tanggapan pemerintah di kawasan ini seakan menutup mata sebab enggan melakukan audit juga membiarkan fasilitas penangkaran ini beroperasi tanpa pengawasan ketat yang akhirnya melibatkan praktik korupsi, dan semakin mengekspos bahwa praktik ilegal yang dijalankan semacam ini sering kali dilindungi oleh aktor berpengaruh (EIA, 2020).

Berdasarkan hasil laporan investigasi EIA di wilayah *Sin City* di *Golden Triangle Special Economic Zone* (GTSEZ), Laos pada tahun 2015, EIA mendokumentasikan perdagangan yang dilakukan secara terbuka di zona ini seperti tulang, daging, dan produk harimau lainnya yang dijual kepada turis asing. Memperlihatkan bagaimana publikasi semacam ini dapat menjadi bahan untuk melakukan advokasi secara *namingshaming* kepada aktor negara terkait, mengingat eksposur yang tercipta cenderung menjadi alat tekanan politik bagi negara-negara tersebut (EIA, 2015a). Dalam hal ini EIA juga terlihat berupaya mendorong implementasi keputusan CITES 14.69 (tahun 2007) yang menyerukan penghapusan fasilitas penangkaran komersial secara bertahap (EIA, 2015a).

Selain investigasi lapangan, EIA juga memanfaatkan basis data pola garis harimau (*stripe patterns*) yang dapat membantu aparat penegak hukum mengidentifikasi dari manakah asal harimau yang disita, untuk mengetahui apakah mereka berasal dari alam liar atau fasilitas penangkaran tertentu (EIA, 2020). Selain itu melalui proyek yang didanai oleh IWT *Challenge Fund* pemerintah Inggris, EIA memperkuat hubungan dengan mitra lokal seperti *Education for Nature Vietnam* (ENV) dan *Wildlife Friends Foundation Thailand* (WFFT) untuk memetakan rute transnasional antara Laos dan Vietnam (UK aid, 2019).

Keterlibatan INGO yang variatif di kawasan *Greater Mekong* mencerminkan ragam perkembangan strategi dalam merespons isu ini. Adanya keterbatasan pada otoritas negara, di mana sumber daya teknis, ego sektoral antar lembaga, serta

tantangan yang kerap hadir dalam penanganan isu ini sering kali dimanfaatkan oleh jaringan kriminal transnasional yang akhirnya memanggil keterlibatan INGO.

Negara-negara biasanya cenderung mengimplementasikan penegakan hukum yang bersifat reaktif, dan sering kali terhenti pada fase penyitaan barang bukti tetapi tidak sampai membongkar struktur organisasi kriminal yang menggerakkan perdagangan tersebut. Kesenjangan antara ketersediaan bukti lapangan yang dapat membantu dalam memperkuat dan mengoptimalkan proses penegakan hukum membuat urgensi untuk menelusuri *Wildlife Justice Commission* (WJC) menjadi semakin kuat. WJC secara khusus mengadopsi penggunaan intelijen yang profesional dan menargetkan pemimpin teratas jaringan sindikat atau *kingpins*, agar dapat membongkar jaringan kriminal tersebut. Ini menawarkan pendekatan operasional yang melampaui mandat organisasi konservasi tradisional. Variabel unik ini menjadikan peran WJC sebagai aktor kunci dalam menutup celah impunitas di *Greater Mekong*, sebagaimana yang akan dieksplorasi lebih mendalam melalui inisiatif unggulannya, *Operation Ambush*.

2.4. Profil dan Pendekatan WJC: Inisiatif *Operation Ambush* (2016-2022)

Adanya keterbatasan kapasitas negara yang belum sepenuhnya mampu dalam menjangkau kompleksitas perdagangan ilegal satwa liar menunjukkan pentingnya kehadiran INGO sebagai aktor non-negara dalam merespons ancaman keamanan non-tradisional ini. Mengingat karakteristik kejahatan yang bersifat lintas batas dan

terorganisir, upaya penanganannya tidak dapat bergantung pada respons reaktif semata, tetapi memerlukan respon yang lebih terkoordinasi dan proaktif. Di tengah eskalasi ancaman ini *Wildlife Justice Commission* (WJC) muncul sebagai INGO yang unik dengan memposisikan dirinya pada titik temu antara *criminal justice* dan perlindungan terhadap biodiversitas. Misi yang mereka bawa dalam pergerakannya adalah dengan mengganggu (*disrupt*) dan membongkar (*dismantle*) jaringan kejahatan transnasional yang terlibat dalam perdagangan ilegal satwa liar, kayu dan, ikan, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk dijadikan dasar akuntabilitas hukum, sehingga aktivitas kejahatan terorganisir ini tidak terus mendorong spesies menuju kepunahan (WJC, n.d.-a). Sebagai organisasi yang didirikan pada tahun 2015, di Den Haag Belanda, WJC terbilang relatif muda sebagai aktor yang progresif dalam dinamika pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar (WJC, n.d.-e).



Gambar 2. 3. Logo *Wildlife Justice Commission*

Sumber : Wildlife Justice Commission, 2026

Menelusuri latar belakang awal pembentukan WJC, bermula pada tahun 2015 ketika di Afrika terjadi krisis kepunahan terhadap gajah, badak, dan trenggiling. Hal ini menyadarkan bahwa selama ini penegakan hukum cenderung terbatas pada pelaku lapangan, sementara aktor tingkat tinggi di balik jaringan kriminal lintas batas tersebut sering kali tidak tersentuh oleh hukum. Menanggapi kesenjangan tersebut, *Peace Parks* dan WWF Belanda dengan dukungan *Dutch Postcode Lottery's Dream Fund* mengambil langkah baru yang berani dengan menginisiasi pembentukan WJC untuk menerapkan kekuatan penuh instrumen hukum pidana terhadap perdagangan satwa liar, menyikapinya dengan keseriusan yang setara dengan penanganan *transnational organized crimes* lainnya (WJC, n.d.-c).

Dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan mereka menangani kejahatan terhadap satwa liar, WJC memulai fokus yang kuat pada wilayah Asia Tenggara, di mana model operasional pertamanya melibatkan pengumpulan bukti yang dapat ditindaklanjuti untuk kemudian diserahkan kepada otoritas nasional dalam bentuk Berkas Kasus (*Case Files*). Bila pihak otoritas gagal mengambil tindakan yang memadai, WJC dapat mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (*Public Hearing*) sebagai upaya terakhir untuk memeriksa Berkas Kasus tersebut, dan menentukan tindakan yang dapat dan harus diambil. Sidang pertama dan satu-satunya yang diadakan hingga saat ini adalah terhadap Vietnam pada tahun 2016 di gedung *Peace Palace*, Den Haag, Belanda, karena sejak itu pemerintah negara yang WJC dekati

termasuk Vietnam, selalu kooperatif dalam mengambil langkah berdasarkan bukti yang mereka berikan (WJC, n.d.-e).

Ekspansi dan signifikansi WJC terkait cakupan kerja dan pendekatan operasionalnya semakin berkembang pesat sejak tahun 2017, ketika melanjutkan pendekatan investigasinya ke Afrika hingga sampai pada peningkatan analisis intelijen dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Pada periode 2017-2018 WJC memperkuat perannya dalam advokasi kebijakan dengan pertama kali mendesak pemerintah untuk mengatasi kejahatan terhadap satwa liar di berbagai forum internasional. Upaya ini terus berkembang pada 2019–2020 melalui perluasan kerja kebijakan dan peningkatan dukungan operasional kepada lembaga penegak hukum, di mana hasil dari berbagai upaya tersebut terlihat pada 2021–2022 dengan tertangkapnya sejumlah aktor utama perdagangan satwa liar yang sekaligus membongkar jaringan kriminal transnasional (WJC, n.d.-e). Sejalan dengan Rencana Strategis 2021–2026, WJC kemudian menekankan penguatan kapasitas mitra penegak hukum serta pemberdayaan pemerintah dalam penegakan hukum. Di tahun-tahun berikutnya, WJC juga memperluas cakupan kerjanya ke kejahatan perikanan serta memperluas jangkauan global melalui berbagai operasi lintas kawasan (WJC, n.d.-e).

Mandat *Wildlife Justice Commission* sangat spesifik dalam membedakan dirinya dari organisasi lingkungan lainnya. Fokus utamanya bukan pada rehabilitasi satwa atau perlindungan habitat secara fisik, melainkan pada aspek keadilan kriminal (*criminal justice*). WJC memperlihatkan fokusnya untuk memerangi kejahatan

perdagangan terhadap satwa liar itu sendiri yang semakin terorganisir dan bersifat lintas negara. Keunggulan kompetitif *Wildlife Justice Commission* terletak pada metodologi pengumpulan bukti konkret yang menitikberatkan pada investigasi dan analisis intelijen untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang sistematis, dan memungkinkan pertukaran informasi dengan pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti (WJC, n.d.-d). Selain itu, dilakukan juga penguatan kapasitas penegak hukum, serta advokasi kebijakan guna membongkar jaringan kejahatan lingkungan dan mendorong penegakan hukum yang lebih kuat. Serangkaian pendekatan ini dapat membantu pemerintah meminta pertanggungjawaban para pelaku perdagangan satwa liar dan mengakhiri perdagangan ilegal sekaligus menekan laju kepunahan spesies yang rentan (WJC, n.d.-d).

Para investigator WJC yang merupakan mantan petugas penegak hukum dari Australia, AS, Uni Eropa, serta negara-negara Afrika dan Asia, juga memiliki banyak pengalaman gabungan dalam investigasi kasus besar, investigasi perdagangan satwa liar internasional, pengawasan, penyamaran, dan analisis intelijen. Bahkan pakar penegak hukum WJC juga melatih lembaga penegak hukum dalam teknik investigasi kejahatan satwa liar (WJC, n.d.-d).

Dalam kerangka ini, kehadiran *Wildlife Justice Commission* merepresentasikan sebuah model pendekatan yang relatif baru dalam upaya penanganan kejahatan terhadap satwa liar. Pendekatan yang dilakukan WJC menempatkannya pada posisi yang berbeda dibandingkan banyak organisasi konservasi lainnya, karena tidak hanya

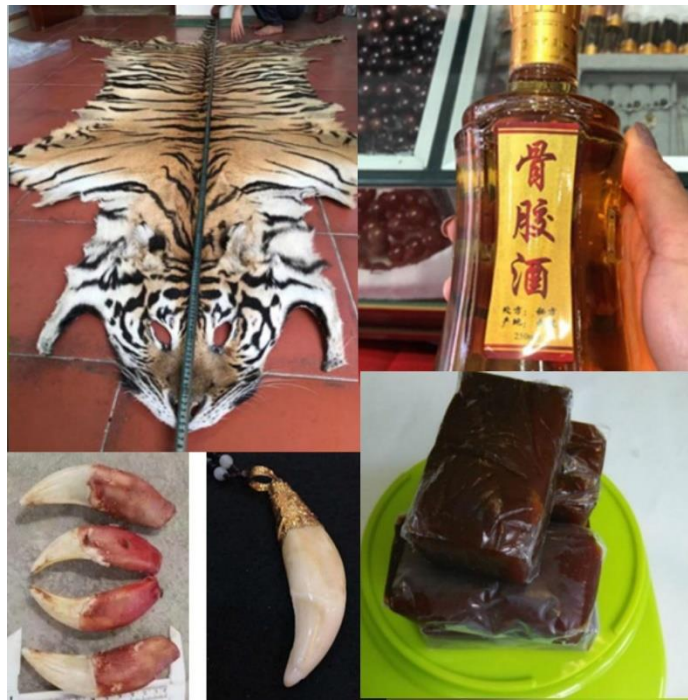
berupaya melindungi spesies yang terancam, tetapi juga secara langsung berfokus pada pembongkaran struktur kejahatan terorganisir yang menopang perdagangan tersebut (WJC, n.d.-a). Karakter pendekatan ini kemudian tercermin dalam berbagai operasi investigatif yang dijalankan oleh WJC, salah satunya melalui operasi yang menargetkan jaringan perdagangan ilegal harimau di kawasan *Greater Mekong* (WJC, 2022a).

Operation Ambush menjadi salah satu operasi investigatif yang diprakarsai oleh *Wildlife Justice Commission* yang secara khusus memerhatikan pertimbangan serius terkait perdagangan ilegal harimau di kawasan *Greater Mekong* (WJC, 2016a). Operasi ini merupakan operasi jangka panjang yang dimulai sejak tahun 2016 hingga 2022, inisiasi operasi ini menyusul dari adanya laporan pada tahun 2014 dari sekretariat CITES yang menyampaikan bahwa terdapat kenaikan penyitaan spesimen harimau di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, serta disebutkan pula dalam rentang tahun 2010-2012, dari 61 ekor harimau hidup yang disita, sebanyak 74% disita dari tiga negara yaitu Laos, Thailand, dan Vietnam (WJC, 2016a). Temuan ini memicu kekhawatiran serius mengenai asal-usul harimau tersebut, mengingat keberadaan *tiger farms* di negara-negara ini, ditambah dengan jumlah populasi harimau yang sangat sedikit (WJC, 2016a).

Diluncurkannya *Operation Ambush* pada Juli 2016 ini bertujuan untuk mencari tahu lebih dalam atas apa yang menjadi pendorong serta melihat bagaimana dinamika kejahatan terorganisir dibalik perdagangan ilegal harimau di seluruh Asia (WJC,

2016a). Dengan menaruh fokusnya pada keterkaitan fasilitas penangkaran (*tiger farms*) dengan jaringan perdagangan ilegal lintas negara yang beroperasi di kawasan Asia (WJC, 2016c). Pelaksanaan investigasi ini mencakup wilayah operasional lintas batas yang luas, dengan fokus pada hub perdagangan di Laos, Thailand, dan Vietnam yang berada dalam kawasan *Greater Mekong*. Selama enam tahun, Temuan WJC mengungkap bahwa fasilitas penangkaran hanyalah sekedar kedok semata, di mana fasilitas penangkaran di *Greater Mekong* justru sering digunakan sebagai tempat "pencucian" harimau hasil buruan atau sebagai pusat produksi produk turunan lain yang terbuat dari harimau (WJC, 2022a).

Investigasi yang dilakukan secara *undercover* memungkinkan tim investigasi WJC untuk berinteraksi langsung dengan para pelaku perdagangan satwa liar ilegal. Para investigator dapat mengumpulkan berbagai bentuk bukti, termasuk dokumentasi transaksi ilegal, identifikasi pelaku kunci dalam jaringan perdagangan, serta pemetaan jalur distribusi perdagangan harimau di kawasan tersebut (WJC, 2022a). Data mentah yang terkumpul ini kemudian dianalisis melalui pendekatan intelijen untuk mengidentifikasi pola perdagangan, struktur jaringan kriminal, serta keterkaitan antara berbagai aktor yang terlibat dalam rantai perdagangan ilegal harimau (WJC, 2016c).



Gambar 2. 4. Ragam Bagian Tubuh dan Produk Harimau yang Diperdagangkan

Sumber : Wildlife Justice Commission, 2022

Dinamika pasar yang ditemukan melalui operasi ini memperlihatkan seluruh spektrum bagian tubuh harimau, seperti yang terlihat pada gambar 2.4. mulai dari kulit dan taring yang diincar sebagai representasi simbol status, hingga tulang yang direbus untuk dijadikan *wine* tonik harimau dan pasta (*tiger bone paste*) (WJC, 2022a). Temuan menarik lainnya juga menunjukkan bahwa sindikat ini bersifat multidimensi, sebab ternyata pelaku perdagangan ilegal harimau sering kali juga mengelola komoditas ilegal lain seperti gading gajah, cula badak, dan kayu mawar (WJC, 2022a). Dalam interaksi jual beli yang terjadi, WJC mengidentifikasi penggunaan platform media sosial seperti *Line*, *WeChat*, dan *Facebook* oleh pedagang profil tinggi untuk

berinteraksi dengan pembeli, melakukan negosiasi harga, dan memamerkan stok ilegal secara anonim (WJC, 2016a, 2022a).

Secara geografis, Laos diidentifikasi sebagai hub sentral untuk pemrosesan produk harimau yang ditujukan bagi pasar Vietnam dan Tiongkok, sementara itu WJC juga berhasil memetakan rute penyelundupan signifikan yang baru terdeteksi, yakni pergerakan harimau liar dari India yang masuk melalui Malaysia sebelum berakhir di pasar Vietnam (WJC, 2016a). Di tingkat domestik, di Vietnam khususnya wilayah Ha Tinh dan Hanoi menjalankan peran sebagai pusat fasilitas penyimpanan serta penyembelian, yang ironinya konsumen elit dari Vietnam dan Tiongkok ini diperkenankan memilih langsung harimau mana yang mereka inginkan untuk dilakukan penyembelian. Sementara itu kota Mong Cai berfungsi sebagai titik keluar utama menuju pengiriman ke Tiongkok (WJC, 2022a).